

ANALISIS PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA SEMARANG

Rizka Utami Indra¹, Retna Hanani², Kismartini³
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kode Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Abstract: Floods are one of the disasters that often occur in Semarang City. In an effort to minimize the occurrence of flood disasters, involvement from stakeholders is needed. This study aims to analyze the role of stakeholders in flood disaster management efforts and analyze the supporting and inhibiting factors of stakeholders' role in flood disaster management in Semarang City. This research method uses a qualitative descriptive approach. Data collection was conducted through interviews and literature studies. The informant determination technique uses purposive sampling techniques. The results of this study show that the Semarang City Regional Disaster Management Agency is a key stakeholders in flood disaster management. Then the residents of Tanjung Mas Village and the Semarang City Public Works Office are the primary stakeholders. Furthermore, the Semarang City Spatial Planning Office, Pemali Juana River Basin Center, and Tanjung Mas Village Government are secondary stakeholders. These stakeholders carry out the role of stakeholders analyzed according to Nugroho's theory in (Setiawan et al., 2018), namely: Policy Creator, Coordinator, Facilitator, Implementer, and Accelerator. Each stakeholders carries out its role in accordance with their respective duties and functions. The supporting factors for the role of stakeholders in flood disaster management, namely: values, beliefs, and policies. While the inhibiting factor of the role of stakeholders is found in communication problems.

Key words: Flood disaster, The role of stakeholders, Semarang City

PENDAHULUAN

Bencana alam berupa banjir sering terjadi di Indonesia. Hal ini mengacu pada data statistik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2022), di mana banjir terjadi sebanyak 1.531 kejadian sepanjang tahun 2022. Kota Semarang adalah salah satu daerah yang sering mengalami bencana banjir. Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, bencana banjir terjadi setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Data Bencana Banjir di Kota Semarang Tahun 2015-2022

No.	Tahun	Jumlah Kejadian
1.	2015	48
2.	2016	30
3.	2017	36
4.	2018	34
5.	2019	18

6.	2020	23
7.	2021	88
8.	2022	63

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang (2023)

Pemerintah menyadari urgensi kebijakan untuk penanggulangan banjir sebagai respon terhadap tingginya risiko banjir di Indonesia. Salah satu kebijakan untuk penanggulangan bencana yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kemudian agar penanggulangan bencana berjalan secara terpadu dan terkoordinasi secara menyeluruh di tingkat daerah juga ditetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang. Kebijakan tersebut diimplementasi-kan pemerintah Kota Semarang dalam program, seperti: normalisasi banjir kanal timur dan barat, pemasangan polder, pembangunan waduk,

peninggian jalan, pengaturan tata guna lahan, pengendalian erosi di DAS, dan pengembangan *Early Warning System* (EWS).

Namun, penelitian terdahulu tentang mitigasi bencana sesuai dengan Permendagri No. 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana di Kota Semarang, menjelaskan bahwa pelaksanaan mitigasi bencana banjir belum maksimal (Permanahadi, 2022). Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan dari 19 indikator mitigasi bencana, Kota Semarang baru menerapkan 52,6% atau 10 indikator. Selanjutnya penelitian yang dilakukan (Syafiril, 2018) ditemukan bahwa kualitas layanan BPBD masih belum maksimal, karena masih terdapat keluhan dari masyarakat. Selain itu, berdasarkan pengakuan salah satu warga Kelurahan Siwalan, menyebutkan bahwa saluran air di sekitar tempat tinggalnya terlalu sempit, sehingga air tidak semuanya bisa tertampung di saluran air (www.kompas.id, 2023). Hal tersebut mengindikasikan bahwa sistem drainase belum cukup baik.

Bencana banjir memiliki permasalahan kompleks dan multidimensi, sehingga perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan peran dan tanggung jawab masing-masing (Nur, 2022). Adapun *stakeholders* yang terlibat dalam penanggulangan banjir di kota semarang yaitu institusi pemerintah, swasta dan masyarakat. Lembaga pemerintahan merupakan *leading* sektor yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan, rencana, dan program untuk penanggulangan banjir (Masyhuri et al. 2021).

Berdasarkan *preliminary research* pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, *stakeholders* dalam pelaksanaan

penanggulangan banjir dilakukan oleh: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Penataan Ruang (Distaru), dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Setiap instansi memiliki kepentingan tersendiri sehingga sering terjadi benturan kepentingan, sulitnya komunikasi dan koordinasi. Hal tersebut menyebabkan belum adanya kesepahaman antar *stakeholders* untuk melaksanakan upaya pengurangan resiko bencana.

Penanggulangan banjir tidak terlepas dari partisipasi masyarakat itu sendiri. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses evakuasi dengan menjadi relawan atau memberikan masukan tentang kebutuhan pengendalian banjir lokal (Nur, 2022). Dari sektor swasta juga dapat mendukung upaya pengendalian banjir dengan menyediakan sumber daya keuangan dan membantu proses rehabilitasi serta rekonstruksi daerah yang terkena bencana (Suleman et al., 2007).

Banyaknya *stakeholders* yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang memiliki kompleksitas tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan analisis peran *stakeholders* dalam penanggulangan banjir. Hal ini guna memetakan kepentingan dan pemahaman dalam penanggulangan banjir, sehingga program/kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan menggambarkan peran *stakeholders* serta faktor-faktor yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait

dan studi pustaka yang relevan. Selain itu, teknik *purposive sampling* digunakan untuk pemilihan informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam konteks penelitian. Adapun keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi *Stakeholders*

Identifikasi *stakeholders* menggunakan teori Handayani dan Warsono dalam (Talib, 2020) yang mengklasifikasikan *stakeholders* menjadi 3 bagian yaitu: *stakeholders* primer, *stakeholders* kunci dan *stakeholders* sekunder.

a. *Stakeholders* Kunci

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan *stakeholders* kunci yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana. BPBD lebih banyak berfungsi sebagai koordinator penanggulangan bencana baik antar instansi pemerintah maupun pemerintah dengan organisasi masyarakat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang memiliki tugas dan fungsi dengan tingkat kepentingan yang tinggi dalam pengurangan risiko bencana. Hal ini ditandai dengan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

Kemudian dalam Peraturan Walikota Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD memiliki tugas dan fungsi dalam perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat ataupun efektif dan efisien.

b. *Stakeholders* Primer

a) Warga Kelurahan Tanjung Mas

Warga Kelurahan Tanjung Mas (Masyarakat Kota Semarang) sebagai *stakeholders* primer merupakan *stakeholders* yang terkena dampak secara langsung terhadap bencana banjir. Peristiwa banjir memberikan dampak negatif kepada warga berupa: kesulitan air bersih, terhambatnya aktifitas, kerugian ekonomi, masalah kesehatan dan dapat menyebabkan korban jiwa.

Warga Kelurahan Tanjung Mas sebagai *stakeholders* primer juga harus dilibatkan penuh dalam tahapan penanggulangan bencana banjir. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dalam Pasal 27 menyebutkan bahwa masyarakat memiliki kewajiban dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Kegiatan yang dilakukan Warga Kelurahan Tanjung Mas dalam penanggulangan banjir yaitu dengan upaya memberikan usulan dalam mengurangi resiko banjir ataupun upaya membuang sampah pada tempatnya serta membersihkan selokan di sekitar perumahan.

b) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang merupakan bagian dari *stakeholders* primer. Sebagai *stakeholders* primer, Dinas Pekerjaan Umum memiliki pengaruh dan kepentingan dalam meminimalisir terjadinya banjir di Kota Semarang. Dinas Pekerjaan Umum menjadi unsur pelaksana di bidang Pekerjaan Umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Pekerjaan Umum dalam penanggulangan bencana banjir berkaitan dengan permasalahan pada drainase. Dalam hal ini, bidang sumber daya air dan drainase mempunyai tugas untuk merencanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan seksi pengelolaan dan pengembangan drainase.

Dinas Pekerjaan Umum berupaya menjadikan Kota Semarang sebagai

kawasan bebas banjir dengan langkah berupa: kegiatan pelaksanaan pendataan saluran drainase, kegiatan pembangunan, pengendalian, dan rehabilitasi pengembangan drainase ataupun kegiatan pengelolaan daerah aliran drainase.

c. *Stakeholders* Sekunder

a) Balai Besar Wilayah sUngai Pemali Juana

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) merupakan unit pelaksana teknis di bidang konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai. BBWS Pemali Juana menjadi salah satu *stakeholders* yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir, terutama di Kota Semarang. BBWS Pemali Juana memiliki peran dalam upaya penanggulangan bencana banjir dengan mempertimbangkan tingkat darurat atau dampak luasan banjir. BBWS Pemali Juana melaksanakan pekerjaan perencanaan dan penanganan banjir secara fisik, berupa: pembangunan bendungan, pembangunan kanal banjir, normalisasi sungai, stasiun pompa, dan kolam retensi. BBWS Pemali Juana bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang. Hal tersebut terjadi karena BBWS Pemali Juana juga memiliki fungsi dalam mengelola drainase utama perkotaan.

b) Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Semarang mempunyai tugas dalam bidang penataan ruang dan bidang pertanahan. Keterlibatan Dinas Penataan Ruang dalam penanggulangan banjir yaitu dengan memberikan pelayanan berupa Keterangan Rencana Kota (KRK). Penggunaan KRK bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan suatu bidang lahan sehingga menjadi persyaratan dalam mendapatkan Izin

Mendirikan Bangunan (IMB). Bangunan yang tidak memiliki IMB dapat memicu terjadinya banjir sehingga diperlukan pemberdayaan oleh pemerintah kepada masyarakat di Kota Semarang. Kemudian dalam penanggulangan banjir, peran Dinas Penataan Ruang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang. Adapun program yang termuat dalam peraturan tersebut yaitu prasarana sumber air dalam sistem pengendalian banjir. Sistem pengendalian banjir yang dikelola oleh distaru, seperti: embung pada sub sistem drainase sungai silandak, madukoro, dan kanal timur.

c) Pemerintah Kelurahan Tanjung Mas

Kelurahan mempunyai kemampuan dalam mengenali ancaman dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan risiko bencana. Kelurahan memiliki peran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanggulangan banjir. Oleh karena itu, Pemerintah Kelurahan Tanjung Mas menjadi *stakeholders* yang terlibat dalam penanggulangan banjir di Kota Semarang. Kelurahan ikut serta dalam penanggulangan bencana banjir dengan upaya mendirikan dapur umum saat terjadinya bencana banjir. Selain itu kelurahan tanjung mas bekerjasama dengan pemerintah Kota Semarang dalam relokasi posko banjir serta paket bantuan lainnya. Keluaran dalam penanggulangan bencana juga tercantum dalam Peraturan Kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

2. Peran *Stakeholders*

Peran *stakeholders* dianalisis menggunakan teori Nugroho dalam (Setiawan et al., 2018) yang dikelompokkan menjadi lima bagian, yaitu: *Policy Creator, Coordinator, Facilitator, Implementor, dan Accelerator*.

a. Policy Creator

Policy Creator atau pembuat kebijakan menurut Nugroho dalam (Setiawan et al., 2018) merupakan tindakan *stakeholders* dalam memenuhi tugas dan wewenangnya untuk berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan. *Stakeholders* yang berperan sebagai policy creator dalam penanggulangan bencana banjir yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang. Adapun menurut dalam Peraturan Walikota Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, tugas dan wewenang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, yaitu:

a. Perumusan kebijakan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

b. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien.

b. Koordinator

Koordinator menurut Nugroho dalam (Setiawan et al., 2018) merupakan tindakan *stakeholders* dalam mengkoordinasikan *stakeholders* lain yang terlibat. *Stakeholders* yang berperan sebagai koordinator dalam penanggulangan bencana banjir yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang. Adapun menurut dalam Peraturan Walikota Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, tugas dan wewenang Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Semarang, yaitu:

a. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan UPTB.

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang melakukan koordinasi dengan *stakeholders* lainnya dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana. Dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang berkoordinasi dengan beberapa *stakeholders*, diantaranya yaitu: Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Kelurahan terkait bencana (Pemerintah Kelurahan Tanjung Mas, dan Masyarakat Kota Semarang (Warga Kelurahan Tanjung Mas).

Dalam menyambungkan informasi, setiap instansi memiliki SOP masing-masing sehingga kepentingan masing-masing instansi saling terbentur. Hal tersebut menyebabkan tidak optimalnya kesepahaman tugas yang akhirnya berdampak pada belum adanya Rencana Aksi Daerah.

c. Fasilitator

Fasilitator menurut Nugroho dalam (Setiawan et al., 2018) merupakan peran *stakeholders* sebagai pihak yang memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran. Pemerintah harus memenuhi apa yang dibutuhkan baik sebelum atau sesudah terjadinya bencana banjir. Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang merupakan leader dalam memfasilitasi penanggulangan bencana banjir dengan upaya: pengadaan pompa dan alat berat ataupun penyelenggaraan swakelola saluran air. Dalam penanggulangan bencana banjir, Dinas Pekerjaan Umum juga bekerja sama

dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana



Gambar 3.4 Infrastruktur Rumah Pompa Sringin di Kota Semarang
Sumber: Dokumentasi Instagram @pupr_sda_pamalijuana (2023)

. Peran fasilitator yang dilakukan secara bersama yaitu dalam pengadaan sistem rumah pompa dan drainase, di mana BBWS Pemali Juana memfasilitasi wilayah banjir yang menjadi wilayah kerjanya. Peran fasilitator juga dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, dengan memberikan bantuan berupa pemberian air bersih.

Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Semarang juga memfasilitasi penanggulangan bencana banjir dengan adanya Keterangan Rencana Kota (KRK). Keterangan Rencana Kota merupakan sebuah peta yang memiliki keterangan secara rinci tentang pemanfaatan suatu kawasan tanah. Keterangan Rencana Kota (KRK) menjadi dasar dari persetujuan bangunan gedung.



Gambar 3.5 Pemberian Bantuan Air Bersih
Sumber: Dokumentasi Instagram @bpbdkotasemarang (2023)

Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Semarang juga memfasilitasi penanggulangan bencana banjir dengan adanya Keterangan Rencana Kota (KRK). Keterangan Rencana Kota merupakan sebuah peta yang memiliki keterangan secara rinci tentang pemanfaatan suatu kawasan tanah. KRK menjadi dasar dari persetujuan bangunan gedung atau yang biasa dikenal dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kawasan yang tidak memiliki IMB berdampak pada rusaknya daerah resapan sehingga dapat menyebabkan banjir (halosemarang, 2023).

Pemerintah Kelurahan Tanjung Mas juga melaksanakan peran fasilitator dengan upaya mendirikan dapur umum saat terjadinya bencana banjir. Kemudian, pemerintah Kelurahan Tanjung Mas juga mendapatkan bantuan fasilitas saat terjadi banjir oleh instansi lainnya, seperti: bantuan sembako dari Baznas, bantuan karung pasir dari Dinas Pekerjaan Umum, dan bantuan tenda pengungsian dari Badan penanggulangan Bencana Daerah. Selain keterlibatan kelurahan, masyarakat Kota Semarang juga ikut terlibat dalam memfasilitasi penanggulangan bencana banjir dalam menyediakan sarana dan prasarana.

d. Implementor

Implementor menurut Nugroho dalam

(Setiawan et al., 2018) yaitu *stakeholders* pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran. Penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang dilaksanakan oleh berbagai *stakeholders*. Peran Implementator yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dalam penanggulangan banjir yaitu dengan mengadakan sosialisasi kebencanaan. Adapun tujuan sosialisasi agar:

- a. Masyarakat tahu bagaimana cara menghindari bahaya banjir dan kerugian yang timbul tidak terlalu besar.
- b. Mengembangkan sikap masyarakat bahwa membuang sampah dan lain-lain di sungai adalah tidak baik dan akan menimbulkan permasalahan banjir.
- c. Menyadarkan masyarakat tentang kerusakan daerah aliran sungai yang diakibatkan oleh umat manusia, dapat mengakibatkan banjir yang lebih parah.

Penyelenggaraan penanggulangan banjir juga dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang berdasarkan pada kegiatan rutinitas dan gawat kebencanaan. Kegiatan rutinitas yaitu melakukan pembersihan sampah pada saluran dan sedimen untuk memperluas penampang basah saluran. Sedangkan kegiatan gawat bencana akan melakukan kerjasama dengan semua pihak dari kelurahan setempat, kecamatan, BBWS Pemali Juana dan BPBD.



Gambar 3.7 Penanganan Tepra terkait Pembersihan Sampah
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang (2022)

Dinas Pekerjaan Umum juga melaksanakan normalisasi saluran di

beberapa titik, terutama normalisasi saluran yang di atasnya terdapat pedagang kaki lima (PKL) atau warung. Pelaksanaan normalisasi akan berkerjasama dengan kelurahan setempat, di mana kelurahan akan mengadakan sosialisasi, sehingga akhirnya DPU dapat bertindak. Kelurahan juga bekerja sama dengan BPBD dalam penanggulangan bencana banjir. Ketika bencana banjir terjadi, Kelurahan Tanjung Mas menjadi penyambung bantuan dari berbagai pihak, salah satunya bantuan dari BPBD yang kemudian akan disalurkan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.8 Bantuan Masyarakat Tangguh Bencana
Sumber: Dokumentasi Instagram (2022).

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana dalam penanggulangan banjir di Kota Semarang biasanya akan melakukan kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Kedua instansi tersebut melaksanakan peran implementor pada penanggulangan banjir dengan cara, seperti: pengerukan sedimentasi, pembuatan tanggul, pembangunan bendungan, kolam retensi, dan embung sebagai pengendali banjir. Selain itu juga melakukan perkuatan tebing sungai-sungai yang kritis. Adapun kegiatan yang telah dan sedang dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana (2020-2022), yaitu: Penanganan Sungai Bringin (4.25 km), Penanganan Sungai Babon (3100 m), Penanganan Sungai Penggaron (300 m), Penanganan Tanggul Sungai hilir

Stringin, Kolam Retensi Kawasan Industri Terboyo Semarang, Pembuatan Rumah Pompa Banjardowo.

Dinas Penataan Ruang sebagai salah satu *stakeholders* yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan banjir di Kota Semarang juga melaksanakan kegiatan/program sesuai dengan bidangnya. Dinas Penataan Ruang akan mengawasi daerah terutama yang berada di pesisir karena terdapat pembatasan bangunan. Pembatasan bangunan ini mengacu pada KRK di mana terdapat 3 kecamatan yang menjadi daerah penyangga, yaitu Ngaliyan, Gunung Pati dan Mijen. Kecamatan tersebut memiliki IMB sebanyak 40%, sedangkan daerah lainnya sebanyak 60%. Hal tersebut bertujuan agar hujan tidak langsung turun ke daerah bawah. Implementasi penanggulangan banjir tidak terlepas dari peran masyarakat. Di mana masyarakat melakukan gotong royong membersihkan saluran pembuangan air.

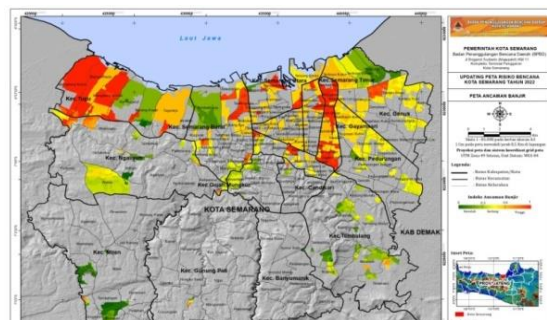
e. Akselerator

Akselerator menurut Nugroho dalam (Setiawan et al., 2018) merupakan *stakeholders* yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.



Gambar 3.10 Aplikasi siPantau
Sumber: BPBD (2023)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang memanfaatkan teknologi dalam upaya penanggulangan banjir. Teknologi sangat diperlukan dalam mempercepat penanggulangan banjir. Dengan teknologi, *stakeholders* dapat mengevaluasi situasi darurat. Pemanfaatan teknologi dalam penanggulangan bencana banjir diimplementasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam bentuk Early Warning System (EWS) dan Sipantau bencana. Kemudian dengan adanya teknologi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dapat melakukan pemetaan daerah yang rawan terjadi banjir. Berikut adalah dokumentasi mengenai Peta persebaran daerah yang menjadi ancaman banjir.



Gambar 3.11 Peta Ancaman Banjir di Kota Semarang

Sumber: BPBD (2023)

Dalam mempercepat kegiatan penyelenggaraan penanggulangan banjir, setiap instansi akan menerima laporan atau aduan dari masyarakat sehingga kegiatan atau program terlaksana sesuai dengan kebutuhan. Adapun dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, dan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana akan menerima aduan masyarakat melalui Layanan Online yang dapat diakses melalui website. Namun tidak semua *stakeholders* dapat menerapkan peran

accelerator.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran *stakeholders*

a. Faktor Pendukung

a) Nilai

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat berjalan secara optimal dengan adanya faktor pendukung berupa nilai-nilai yang diterapkan. Menurut Schwartz dalam (Dahriyanto, 2018) nilai merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh individu dengan tingkat kepentingan yang berbeda-beda, serta menjadi prinsip panutan dalam entitas sosial. *Stakeholders* perlu memahami dan menerapkan nilai pada proses kegiatan penanggulangan bencana banjir. Nilai-nilai tersebut dapat diterapkan ke dalam budaya kerja yang dituangkan dalam maklumat pelayanan.

Penerapan nilai pada peran *stakeholders* dalam penanggulangan bencana banjir mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam ASN. Nilai tersebut merupakan dasar dari Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam suatu persepsi umum sehingga lebih mudah untuk dipahami dan diterapkan

Unsur nilai diterapkan dalam upaya penanggulangan banjir. Hal ini ditandai dengan penerepan nilai secara individual dan profesionalitas. Nilai individual merupakan penerapan dari aduan masyarakat sehingga *stakeholders* terkait dapat menanggapi permasalahan tersebut ketika mendapat lapoan dari masyarakat. Kemudian *stakeholders* dalam penyelenggaraan penanggulangan harus bekerja secara profesionalitas, di mana *stakeholders* melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, sehingga kegiatan atau pekerjaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

b) Kepercayaan

Stakeholders menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan penanggulangan banjir. Sehingga hubungan yang terjalin memiliki peluang munculnya rasa percaya

di antara *stakeholders* terkait. Penanggulangan bencana banjir dapat berjalan secara optimal dengan adanya kepercayaan antar *stakeholders*. Penerapan nilai dan sikap dalam penanggulangan bencana banjir dapat menumbuhkan kepercayaan antar *stakeholders*. Kemudian instansi seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang dan Balai Besar Wilayah Pemali Juana juga telah menerapkan keterbukaan dalam setiap informasinya yang dapat diakses pada website dinas terkait. Hal tersebut dapat memperlancar proses penanggulangan banjir di Kota Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tingkat kepercayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana cukup tinggi. Hal tersebut dilihat dari keterlibatan masyarakat sebagai fasilitator dan implementator dalam penanggulangan bencana banjir. Sehingga, unsur kepercayaan dapat mendukung penanggulangan banjir berjalan secara optimal, serta memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan suatu program kerja.

c) Kebijakan

Penanggulangan banjir oleh *stakeholders* terkait dalam pelaksanaannya juga berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan terkait penanggulangan bencana telah diatur pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kemudian Pemerintah Republik Indonesia juga menetapkan peraturan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Di tingkat daerah juga ditetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang.

b. Faktor Penghambat

a) Komunikasi

Pelaksanaan komunikasi dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat peran *stakeholders* dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang. Setiap

instansi berkoordinasi terkait dengan penanggulangan bencana banjir. Namun dalam upaya koordinasi, komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan ketidaksepahaman. Adanya kesalahan penafsiran dalam memberikan informasi antar instansi masing-masing dapat menghambat upaya penanggulangan bencana banjir. Kemudian setiap instansi memiliki kepentingan masing-masing sehingga kurangnya kesepahaman tugas antar *stakeholders*. Permasalahan tersebut dapat menyebabkan tidak sinerginya tugas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing *stakeholders*. Akhirnya berdampak pada belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam mengurangi resiko bencana di Kota Semarang. Kemudian masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam aduan online sehingga alur koordinasi menjadi panjang.

SIMPULAN

Disimpulkan bahwa *stakeholders* dalam upaya penanggulangan bencana banjir dikelompokkan menjadi tiga bagian. *Stakeholders* kunci pada penanggulangan bencana banjir yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. *Stakeholders* primer yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dan Warga Kelurahan Tanjung Mas. *Stakeholders* sekunder yaitu Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana dan Pemerintah Kelurahan Tanjung Mas. *Stakeholders* yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir telah menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya. Namun, masih terdapat permasalahan pada peran koordinasi. Adapun faktor pendukung peran *stakeholders* yaitu: nilai, kepercayaan, dan kebijakan. Sedangkan faktor penghambat

peran *stakeholders* yaitu: permasalahan komunikasi.

SARAN

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai *stakeholders* utama dalam koordinasi perlu dapat meningkatkan komunikasi sehingga tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memberikan informasi yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir.
2. Pemerintah perlu merumuskan rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengurangan resiko bencana. Hal tersebut dilakukan agar tidak terbenturnya kepentingan antar masing-masing *stakeholders*. Sehingga kesepahaman tugas antar *stakeholders* dapat tercapai.
3. Masyarakat dapat lebih aktif dalam mencari informasi dan memahami pedoman dalam pelayanan online. Hal tersebut dilakukan agar proses pelayanan dan koordinasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Agani, Muh Hasbi Azis, ect. 2020. "Local Government Strategies in Managing Flood Disaster in Tompobulu, Maros, Indonesia". *PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research* 4(2): 1-8.
- Anggara, B., Idris, A., & Hasanah, N. (2019). PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 879–890.
- Anggraini, Dewi. 2007. Analisis Berbasis Masyarakat Mengatasi Banjir Perkotaan : Studi Kasus di Semarang, Indonesia.

- Carter, W. Nick. 2008. "Disaster management: a disaster manager's handbook". Philippines: Asian Development Bank
- Dahriyanto, Luthfi Fathan, et al. 2018. "Intensi Perilaku Pro-Konservasi Ditinjau dari Orientasi Nilai Individu Pada Mahasiswa Universitas Negeri Semarang." *JURNAL PSIKOLOGI ILMIAH* 10(2): 180–91.
- David Adi Susilo, Retno Sunu Astuti dan Budi Puspo Priyadi. 2019. "Stakeholders Analysis dalam Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima." 7(2): 245–58.
- Destiana, Riska, Kismartini, dan Tri Yuningsih. 2020. "Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau". *JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN)* 8(2): 132-153.
- E., Durham, dkk. 2014. "The BiodivERsA Stakeholders Engagement Handbook". BiodivERsA, Paris
- Edi, Kurniawan, dan Erni Suharini. 2021. Bencana Banjir di Kota Semarang dari Kolonial Hingga Reformasi. *Jurnal Studi Sejarah* Volume 31, Nomor 2Keban, Yeremias T.. 2014. Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Erlani, R., & Nugrahandika, W. H. (2019). Ketangguhan Kota Semarang dalam Menghadapi Bencana Banjir Pasang Air Laut (Rob). *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2019.3.1.47-63>
- Hadi, Sudharto P. 2017. In Search for Sustainable Coastal Management: A Case Study of Semarang, Indonesia. *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 55 012054
- Heryati, S. (2020). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 2(2), 139–146.
- Hidayah, Ni A et al. 2019. "Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Wisata Talang Air Peninggalan Kolonial Belanda Di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu Peran Stakeholders Dibutuhkan Untuk Mengoptimalkan Pelaksanaan Pembangunan Termasuk Pembangun." *Jurnal Administrasi Publik* 7(1): 55–71.
- Isa, Muzakar, dan Liana Mangifera. 2017. "Analisis Stakeholders dalam Pengurangan Risiko Banjir di Kabupaten Klaten". Universitas Muhamamadiyah Surakarta
- Isa, Muzakar, dkk. 2013. "Strategi Penguatan Kapasitas Stakeholders dalam Adaptasi Dan Mitigasi Banjir Di Kota Surakarta". *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 17(2): 99-110.
- Indriyan, I., & Hariani, D. (2015). "Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang". *Journal Of Public Policy And Management Review*, 4(4).
- International Finance Corporation. 2007. "Stakeholders Engagement: A Good Practice Handbook for Companies Doing Business in Emerging Markets." International Finance Corporation: 201. <http://www.ifc.org/>.
- Kharimah, Islamia, et al. 2021. "Upaya Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Untuk Mendukung Keamanan Nasional." *PENDIPA Journal of Science Education* 6(1): 57–63.
- Kurniawan, Lilik. 2003. "Kajian Banjir Rob Di Kota Semarang (Kasus: Dadapsari)." *alami* 8(2): 54–59.

- Kurniawati, Wakhidah, and Djoko Suwandono. 2015. "Pengaruh Bencana Banjir Dan Rob Terhadap Ketahanan Ekonomi Kawasan Perdagangan Johar Di Kota Semarang." 1(4): 371–80.
- Mahardika, D., & Setianingsih, E. L. (2018). Manajemen Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Banjir di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 7(2), 502–518.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/20242>
- Mariana, D., Paskarina, C., & Nurasa, H. (2010). Reformasi Birokrasi dan Paradigma Baru Administrasi Publik di Indonesia: Revitalisasi Administrasi Negara. *Graha Ilmu*.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=p3X-LMcAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=p3X-LMcAAAAJ:17ZO-CJnx_8C
- Masyhuri, Aziz et al. 2021. "Kolaborasi Antar *Stakeholders* Dalam Manajemen Bencana Tanah Longsor Di Kota Semarang." *Journal of Education, Humaniora and Sosial Sciences (JEHSS)* 4(2): 854–62.
- Muslimah, 2017. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 (Studi Kasus Pengendalian Kerusakan Hutan Bakau di Kabupaten Kepulauan Meranti). Volume. 4 No. 1 Februari 2017.
- Nur, Mohamad Ichsana. 2022. "Analisis *Stakeholders* Dalam Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Magelang." *Journal of Public Administration and Local Governance* 6(2): 155–65.
- Pasolong, Harbani. 2020. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta Peraturan daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang
- Permanahadi, A., & Widowati, E. (2022). Mitigasi bencana banjir di kota semarang. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 6(2), 225–235.
<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia>
- Pujiastuti, Ratih. 2015. "Pengaruh Land Subsidence terhadap Genangan Banjir dan Rob di Semarang Timur". *Jurnal MKTS* 21(1): 1-12.
- Purnomo, Edi dan Hadi Wahyono. 2019. *Measuring Institutional Collaboration on Coping Flood and Rob in Panjang Baru Village Pekalongan City*. Department of Urban and Regional Planning, Diponegoro University
- Qomariah, Jamiah. 2014. "Pengaruh Efikasi Diri dan Kepercayaan Terhadap Komitmen Organisasi Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat." *Jurnal Manajemen Pendidikan* 5(2): 806–15.
- Sari, Annisa Novita, Adi Susilo, dan Edi Susilo. 2013. *The Role of Stakeholders in Flood Management: Study at Ponorogo, Indonesia*". *The International Journal Of Engineering And Science* 2(10): 1-10.
- Setiawan, Beny, dan Herbasuki Nurcahyanto. 2020. "Analisis Peran *Stakeholders* Dalam Implementasi

- Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang”. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 9(2).
- Subiyakto, Rudi, dkk. 2019. “Implementation Flood Disaster Policy base Community in Cilacap Regency, Central Java Province”. *Prizren Sosial Science Journal* 3(2): 50-55.
- Suleman, S. A., Apsari, N. C., & Bencana, M. (2007). Peran *Stakeholders* dalam Manajemen Bencana Banjir. 4(1), 1–140.
- Talib, D. (2020). ANALISIS PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA. 3(1), 12–18.
- Vidia Reski Awalia, Mappamiring, A. N. A. (2015). Peran pemerintah dalam menanggulangi resiko bencana banjir di kabupaten kolaka utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, V(2), 202–213.
- Widyanti, Putri, Kismartini, dan Maesaroh. 2014. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir (Studi Kasus Proyek Normalisasi Banjir Kanal Barat dan Kali Garang Kota Semarang). *Journal Of Public Policy And Management Review*. Volume 3, Nomor 3
- Zahirah Zahrah, Z. H. (2017). IMPLEMENTASI PROGRAM KELURAHAN SIAGA BENCANA (KSB) DI KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG. *Indonesian Journal of Public Policy and Management Review*, 6, 88–100.